



PETA PROSES BISNIS

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Andy Kurniawan

Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja

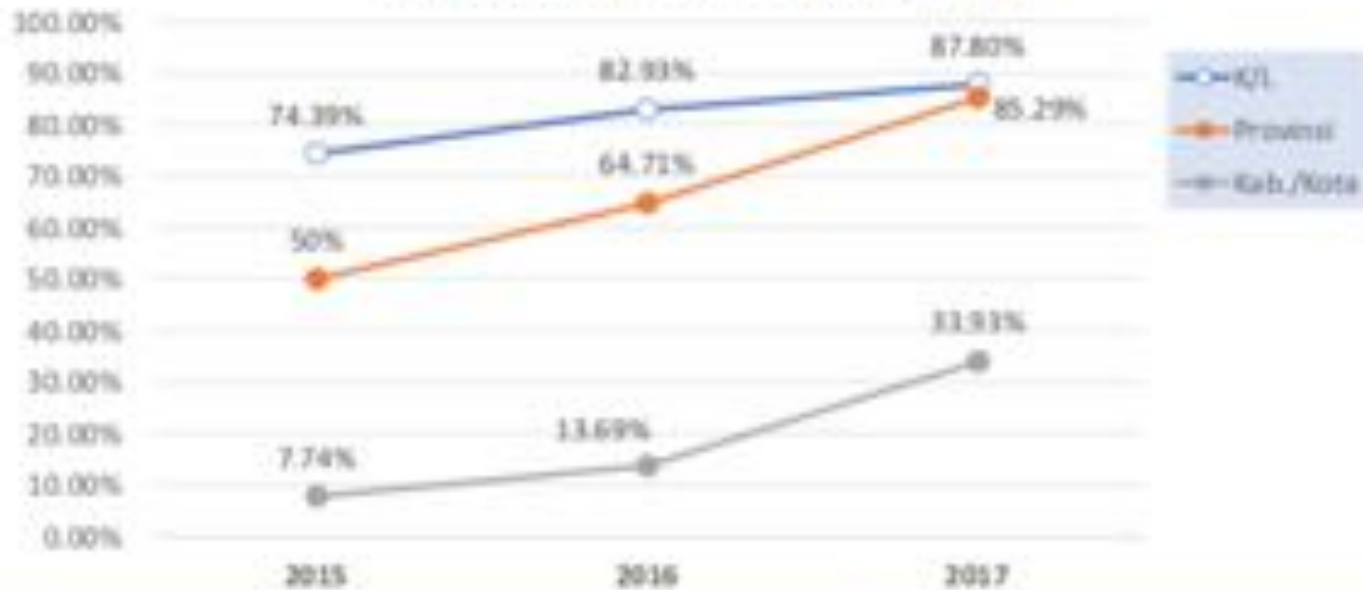


Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.

Dampak Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA)

Trend Akuntabilitas Kinerja Baik



Selama tahun 2017 ditemukan potensi efisiensi penggunaan anggaran sebesar:

Nilai efisiensi 2017

± 41,15 T

Kategori	Rangef Nilai	Kementerian/Lembaga			Pemerintah Provinsi			Kabupaten / Kota		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AA	90-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	80-90	4	4	6	2	3	4	1	2	3
BB	70-80	21	27	26	7	7	6	7	10	30
B	60-70	36	37	40	8	12	19	11	17	189
CC	50-60	16	11	7	11	10	5	171	199	174
C	40-50	0	1	1	1	2	0	209	181	101
D	0-30	0	0	0	1	0	0	14	14	3

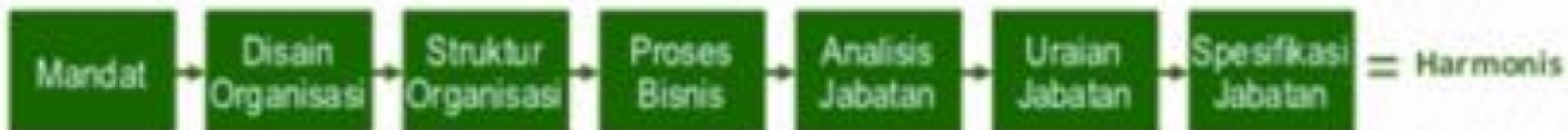
EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Refocusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya cross cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota di Jatim tahun 2017

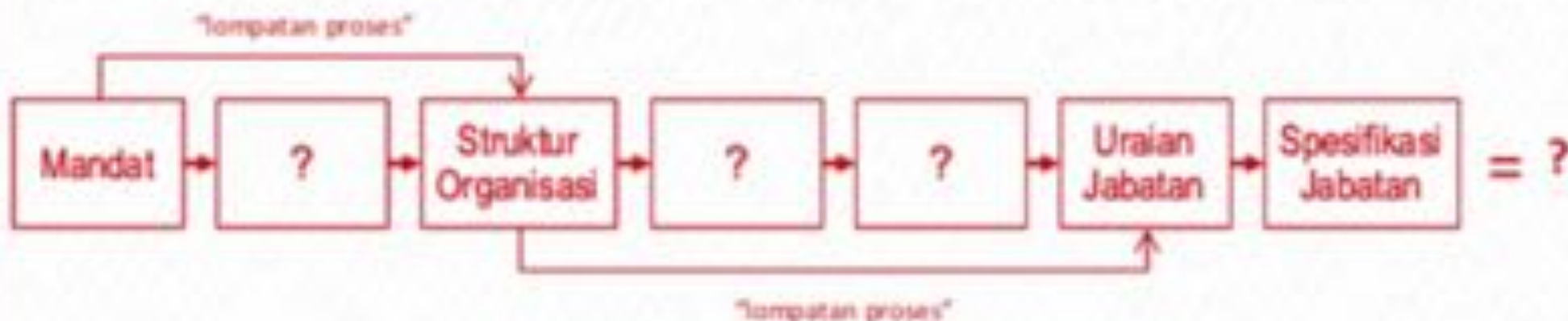
	KABUPATEN KOTA	NILAI	PREDIKAT		KABUPATEN KOTA	NILAI	PREDIKAT
1.	Kab. Banyuwangi	81.31	A	20.	Kab. Situbondo	61.96	B
2.	Kab. Pasuruan	74.03	BB	21.	Kab. Magetan	61.94	B
3.	Kab. Sidoarjo	71.69	BB	22.	Kab. Jombang	61.65	B
4.	Kab. Gresik	71.67	BB	23.	Kab. Bojonegoro	61.50	B
5.	Kab. Lamongan	70.96	BB	24.	Kab. Kediri	61.41	B
6.	Kota Malang	70.96	BB	25.	Kab. Tuban	61.29	B
7.	Kab. Tulungagung	70.94	BB	26.	Kab. Mojokerto	61.23	B
8.	Kota Blitar	70.86	BB	27.	Kota Mojokerto	60.97	B
9.	Kab. Malang	70.51	BB	28.	Kota Kediri	60.90	B
10.	Kab. Bondowoso	70.47	BB	29.	Kab. Madiun	60.82	B
11.	Kab. Probolinggo	70.04	BB	30.	Kab. Lumajang	60.55	B
12.	Kab. Ngawi	70.04	BB	31.	Kab. Sumenep	60.15	B
13.	Kota Surabaya	68.86	B	32.	Kota Probolinggo	60.14	B
14.	Kab. Pamekasan	68.40	B	33.	Kab. Trenggalek	60.02	B
15.	Kab. Pacitan	64.05	B	34.	Kab. Nganjuk	58.43	CC
16.	Kota Madiun	63.50	B	35.	Kab. Jember	58.12	CC
17.	Kab. Blitar	62.86	B	36.	Kab. Bangkalan	56.06	CC
18.	Kab. Ponorogo	62.73	B	37.	Kab. Sampang	55.83	CC
19.	Kota Pasuruan	62.28	B	38.	Kota Batu	42.02	C

Praktek Terbaik



Kesenjangan

Kondisi Saat Ini



1. Adanya "lompatan proses" pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan bisnis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang "seragam";
3. Uraian jabatan yang "seragam" akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja

Definition: Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial

Tematik-Holistik

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan **unsur/bagian/kegiatan** pembangunan sebagai satu **kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan** dan/atau permasalahan yang **saling berkaitan** satu dengan lainnya.

Money follow Program

Alokasi anggaran pembangunan diorientasikan pada pencapaian program prioritas, bukan pada tugas dan fungsi



Perencanaan
Pembangunan
yang berorientasi
pada Substansi



Integratif

dilaksanakan dengan **menyatukan beberapa kewenangan** kedalam satu proses **terpadu dan fokus** yang jelas dalam upaya **pencapaian tujuan** pembangunan Daerah

Spasial

dilaksanakan dengan mempertimbangkan **dimensi keruangan** dalam perencanaan

***Tematik:** Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas*

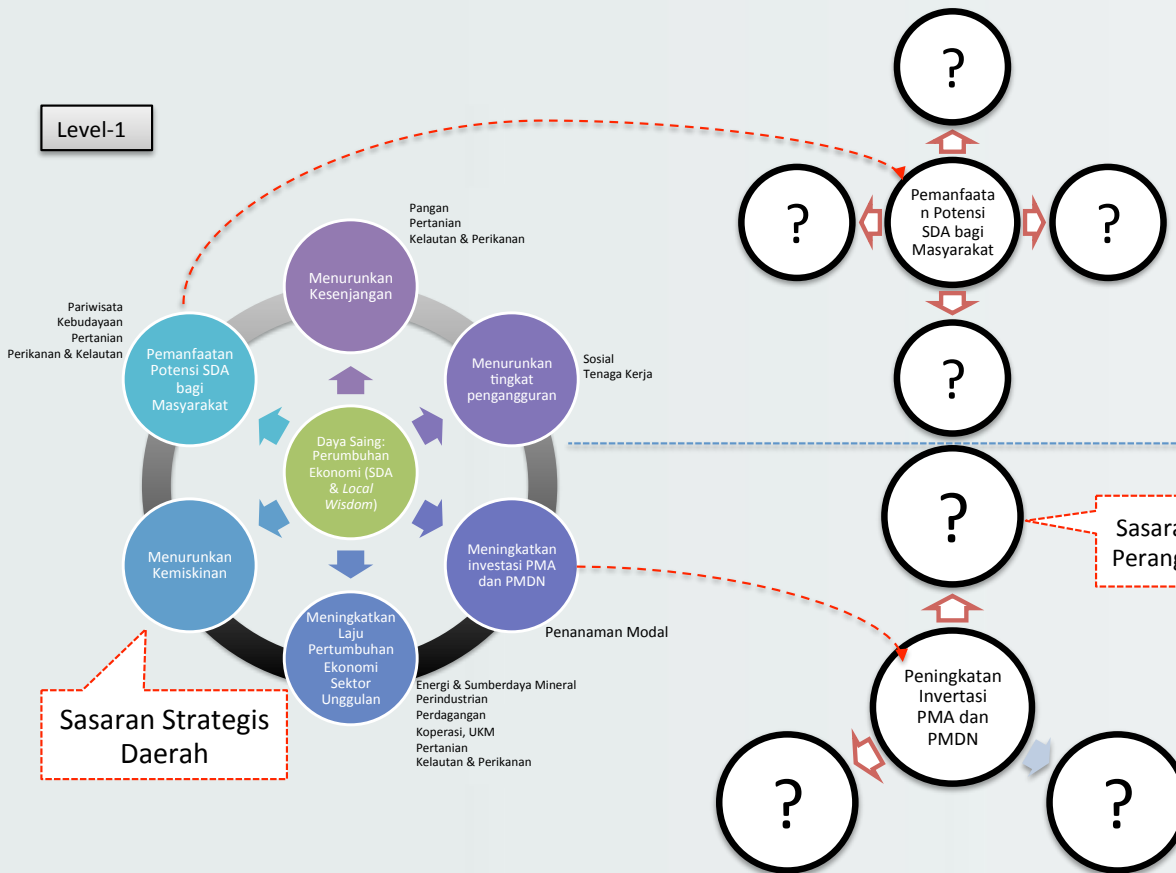
***Holistik:** pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)*

***Integratif:** integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan*

***Spasial:** Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi*

Metode Penyusunan

Perencanaan Kinerja Pembangunan

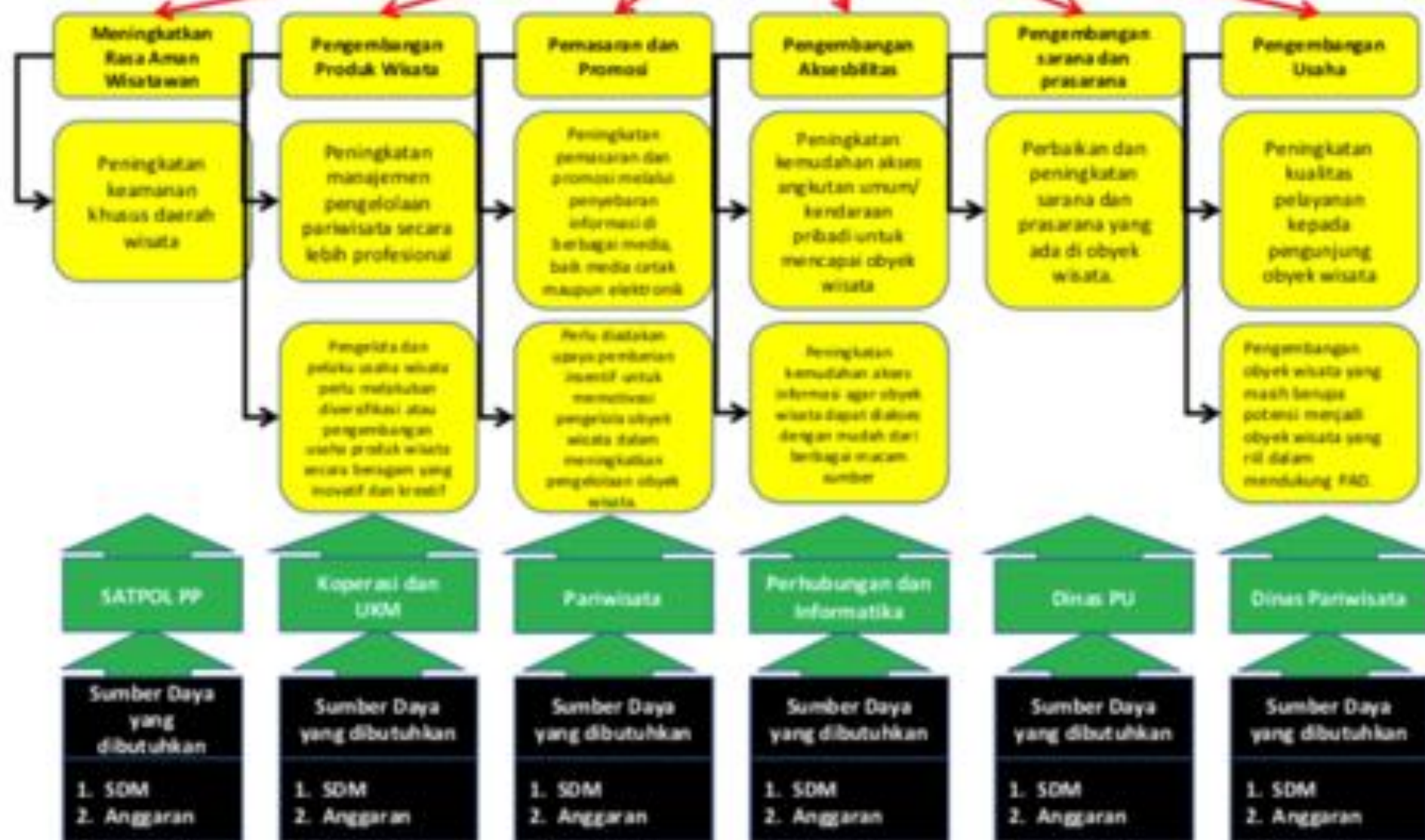


1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.

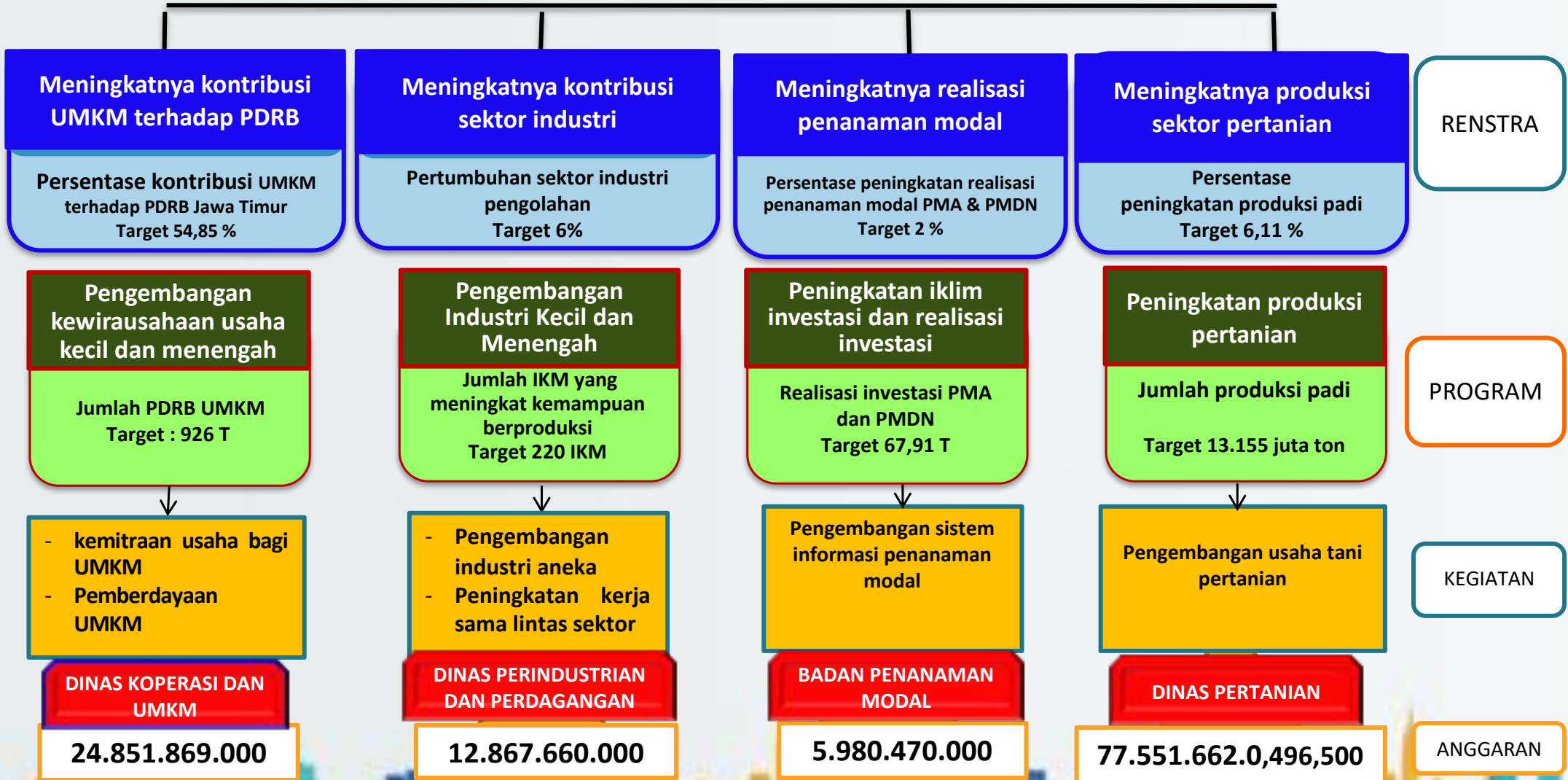


CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

Meningkatkan Industri Pariwisata

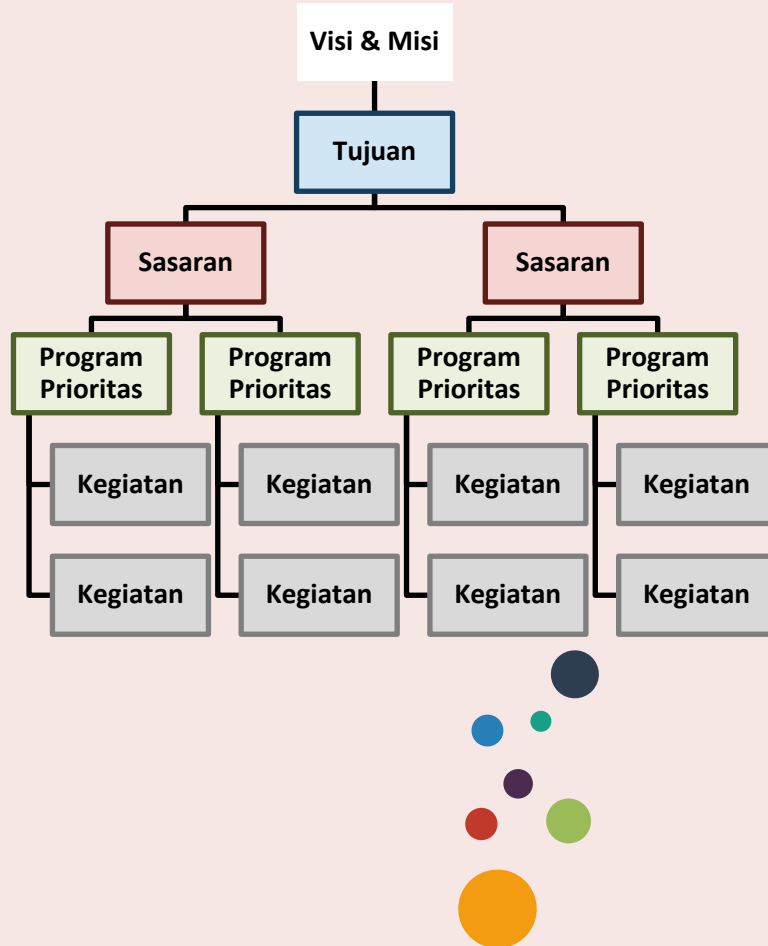


KINERJA UTAMA	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI DAN INDUSTRIAL	RPJMD
INDIKATOR KINERJA	TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI	
TARGET 2016	7,20	

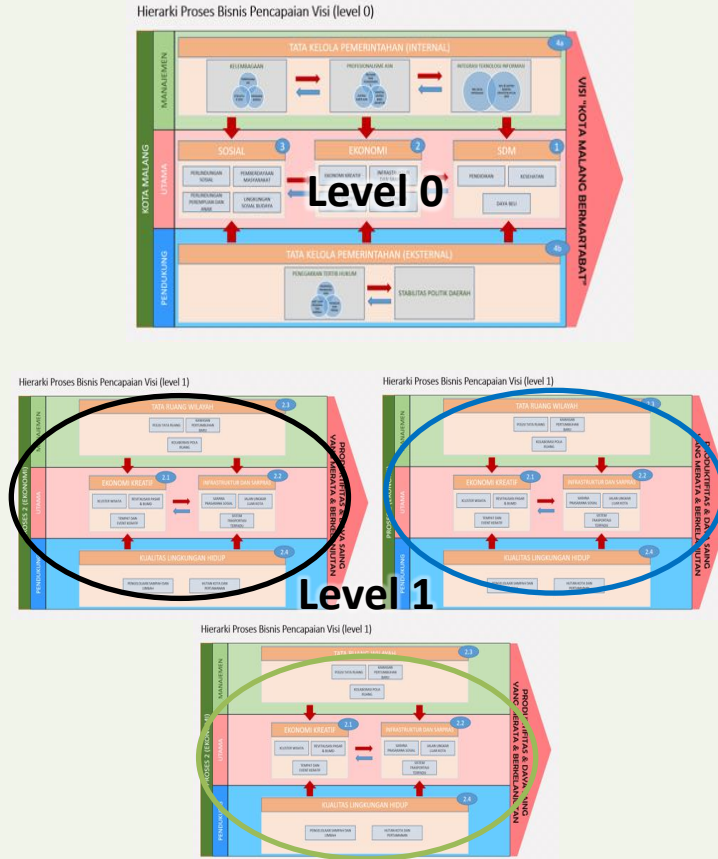


Relasi Integrasi antar Perencanaan dengan Desain Kelembagaan

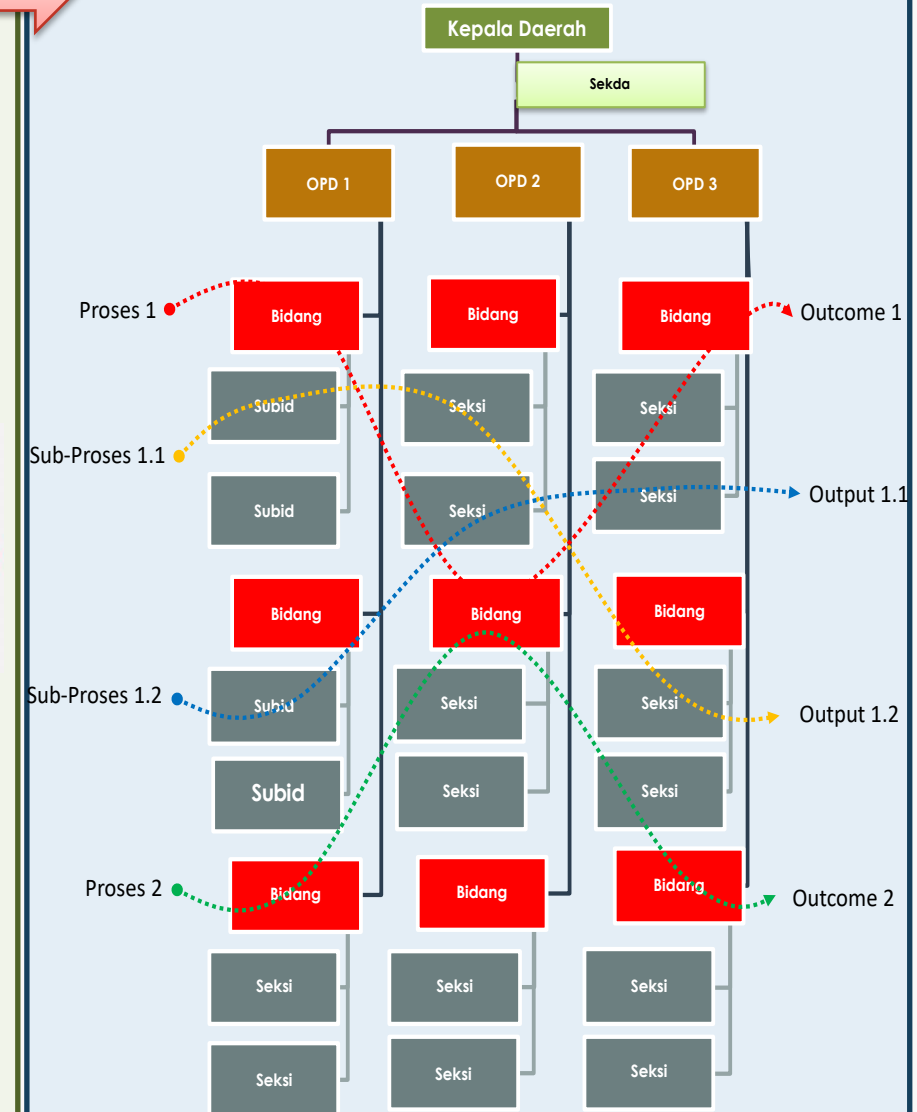
Logframe Kinerja



Peta Proses Bisnis



Desain Organisasi



KONSEP DASAR PROSES BISNIS

Pengertian, Ruang Lingkup dan Relasi

Definisi, Maksud Dan Tujuan

PROSES BISNIS

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang

Maksud dan Tujuan

Agar setiap instansi pemerintah:

1

mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

2

mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal

3

memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis

4

mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan

5

memiliki standar pelaksanaan pekerjaan

PRINSIP-PRINSIP

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah



Definitif

Jelas Batasan, Masukan dan keluaran



Urutan

Aktivitas berurutan sesuai waktu dan ruang



Pengguna Layanan

Berorientasi pada penerima hasil kinerja organisasi



Nilai Tambah

Transformasi dari proses memberikan nilai tambah bagi penrima



PETA PROSES BISNIS



Keterkaitan

Tidak berdiri sendiri, saling terkait dalam satu struktur



Fungsi Silang

Proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi



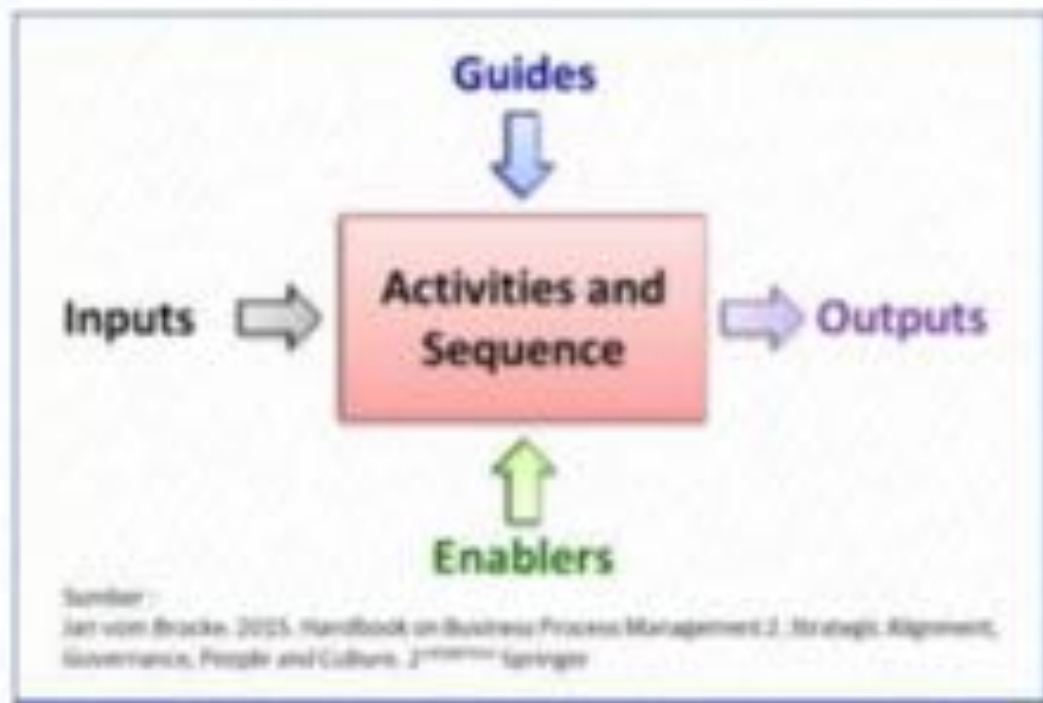
Sederhana-Represntatif

Mewakili seluruh aktivitas dan digambarkan secara simple



Konsensus-Subyektif

Disepakati Bersama seluruh unit organisasi



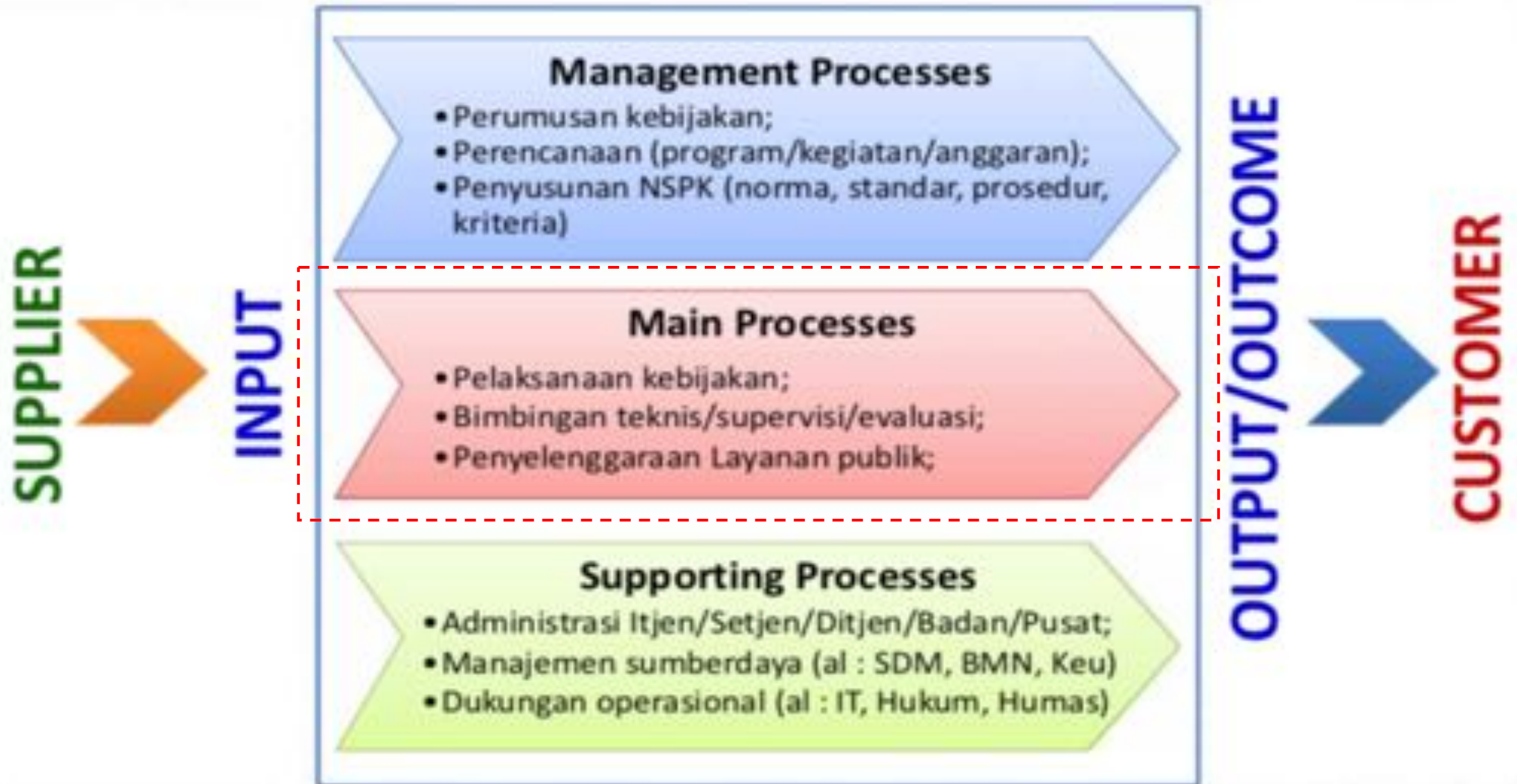
=



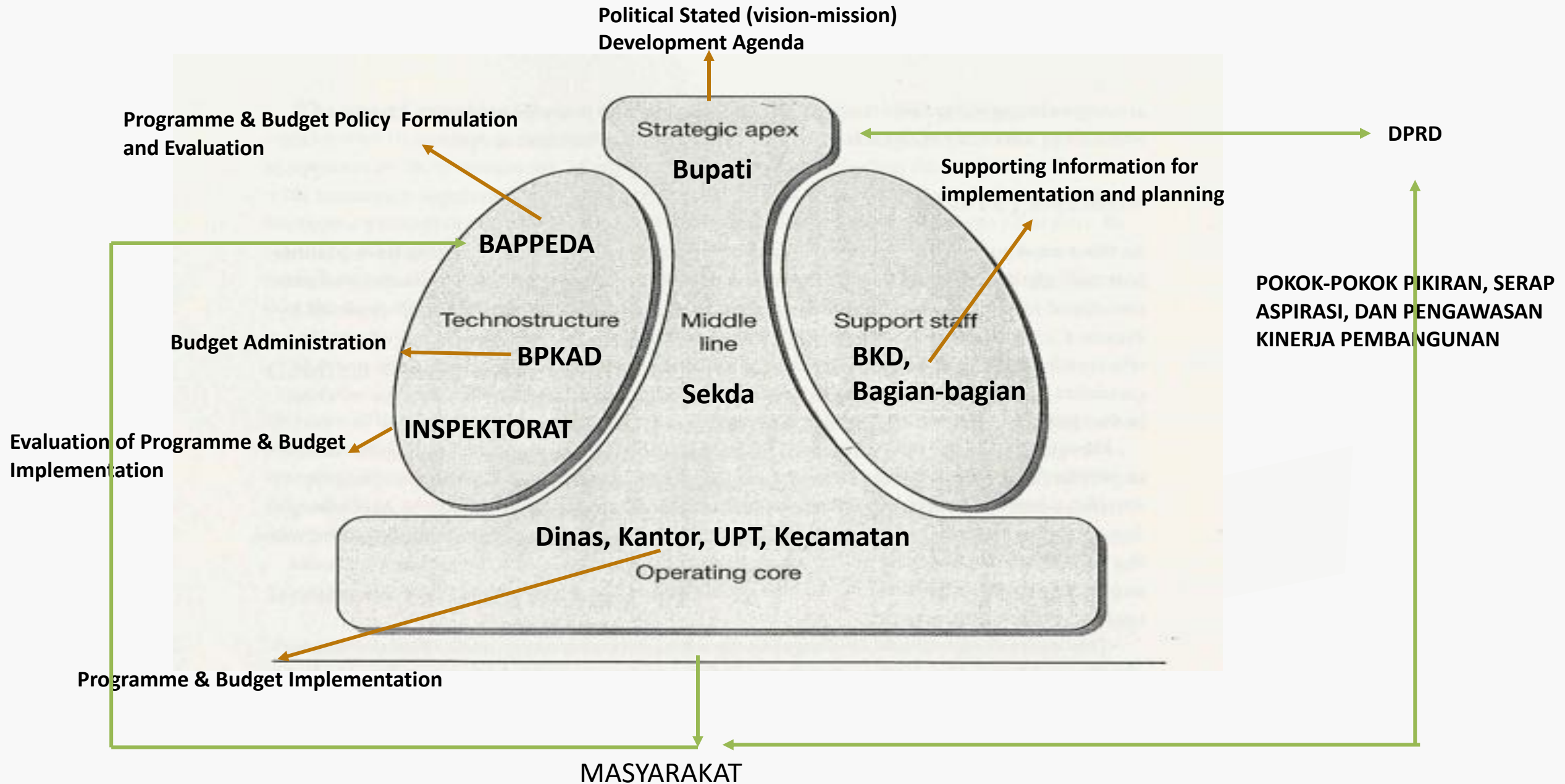
Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis (sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian :

- **Management process = guides** >> menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan;
- **Main process = activities and sequence** >> pelaksanaan proses inti
- **Supporting process = enabler** >> merupakan prasyarat (pendukung) pelaksanaan proses inti;

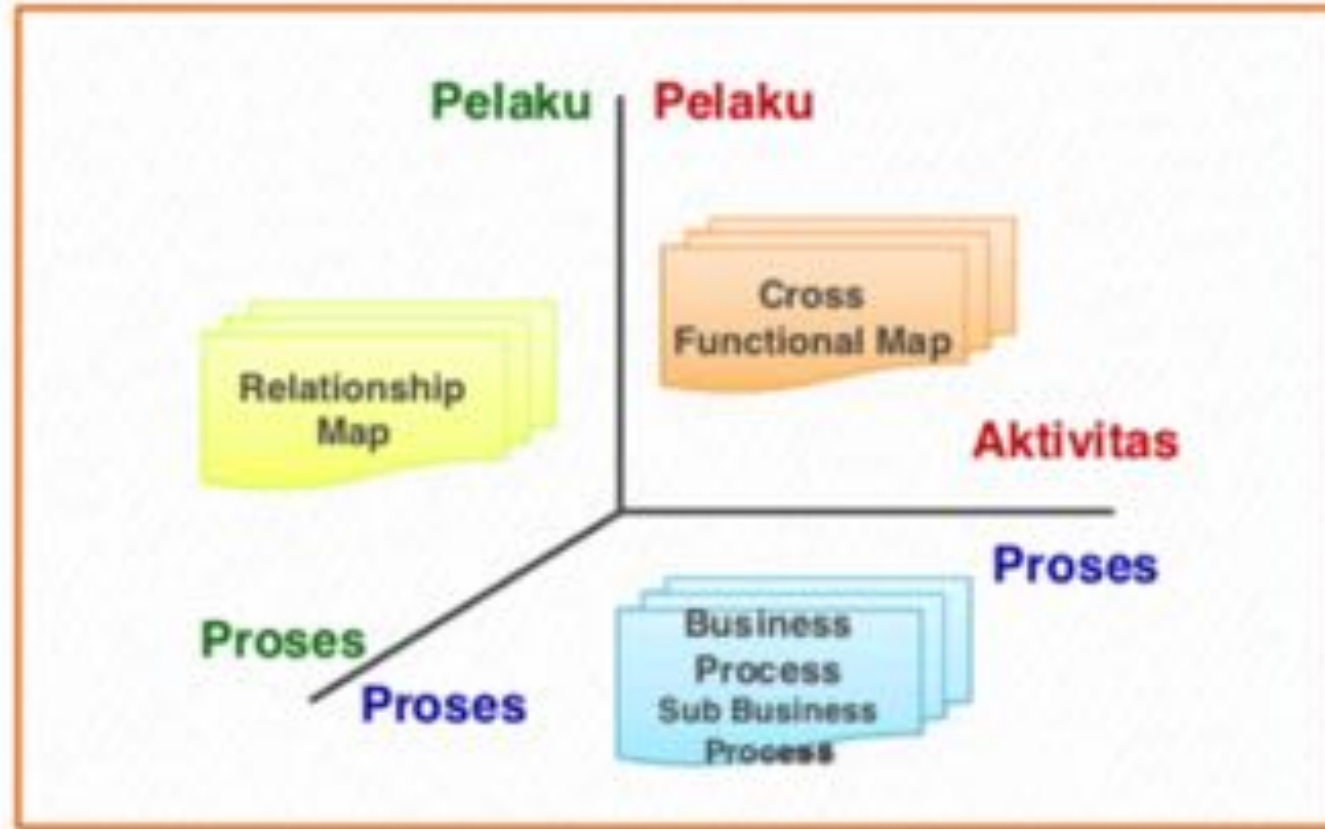
Ruang Lingkup Proses Bisnis



Main bisnis sesuai dengan tipologi kelembagaan



Peta Proses dan Tatalaksana



- **Business process atau Sub-business process** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”;
- **Cross functional map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”;
- **Relationship map** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;

BAGAIMANA MENEMUKAN BISNIS UTAMA ORGANISASI

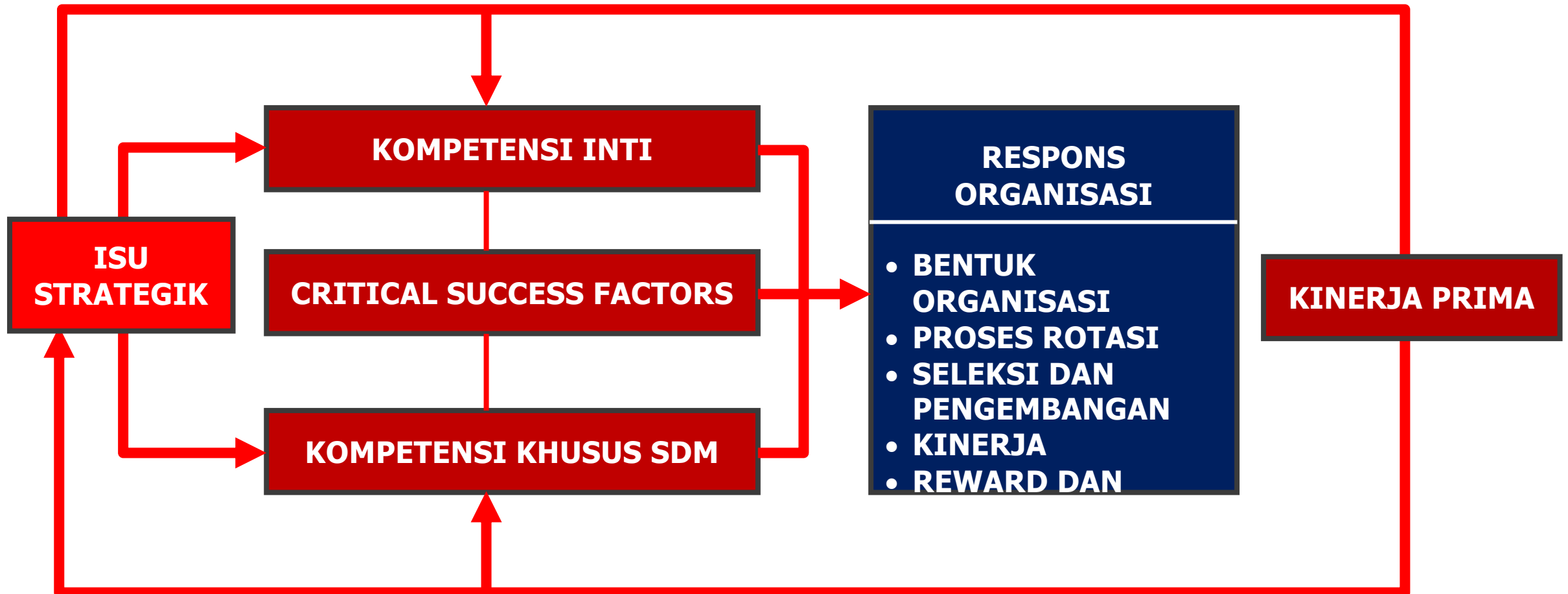
Pendekatan Mission Model Canvas dan Value Proposition

SYARAT DASAR PROSES BISNIS BISA DISUSUN

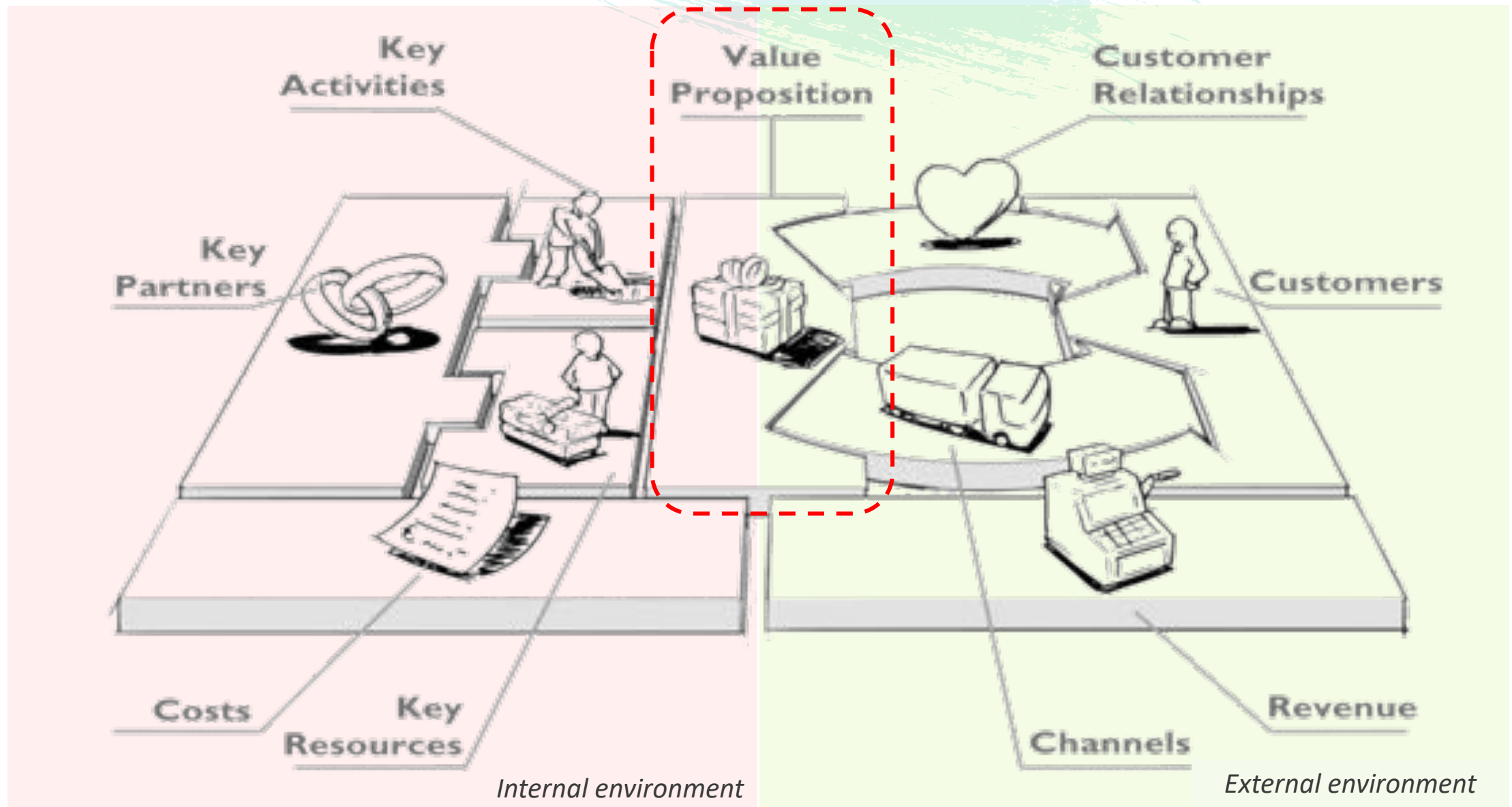
- Perencanaan Kinerja memiliki Logframe;
- Mengetahui Main Bisnis Unit Organisasi;
- Mengetahui *causal loop* pencapaian Kinerja;
- Tidak ada ego sektoral antar unit / sub-unit Organisasi;
- Dilakukan secara Partisipatif;

Membangun Desain Organisasi

PROSES ORGANISASI



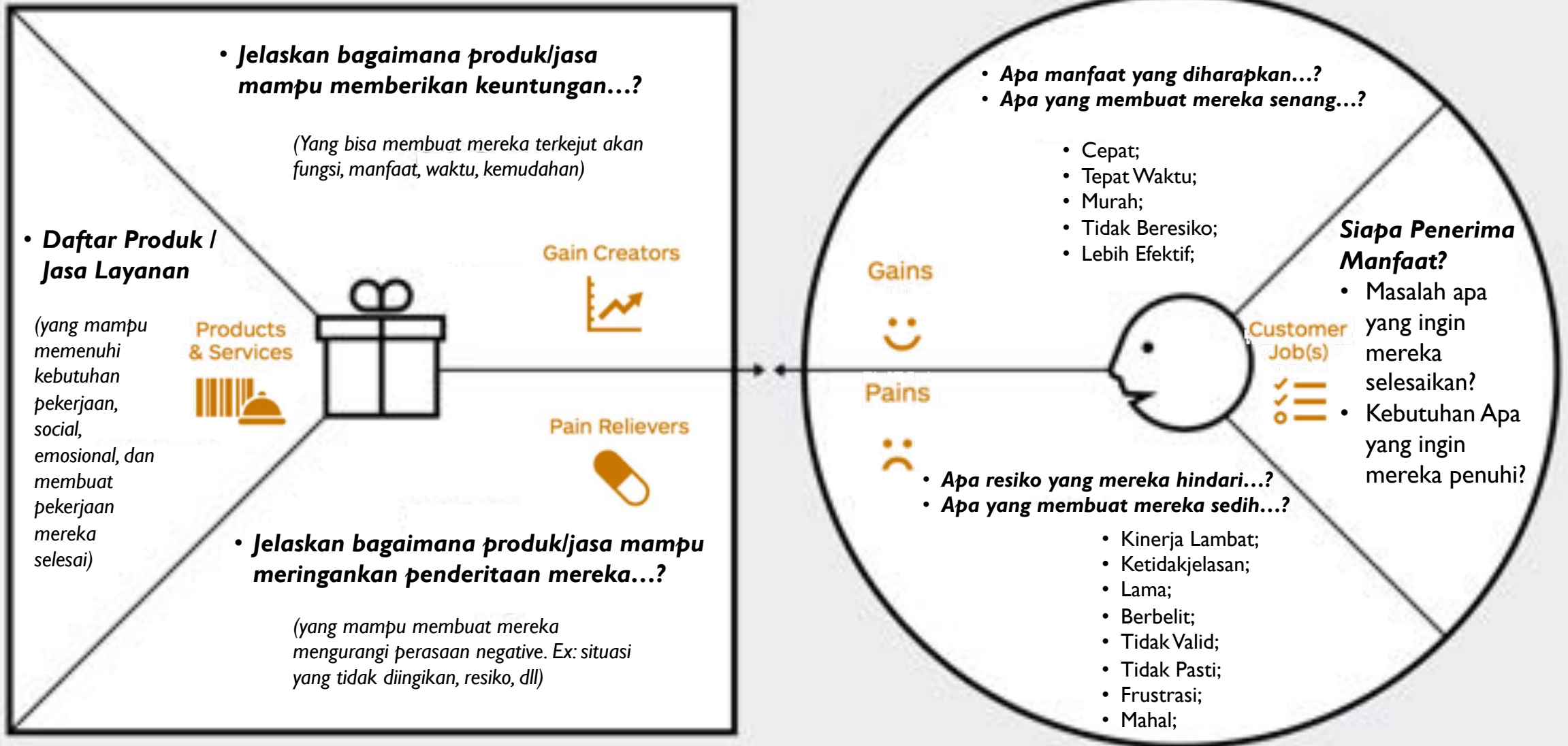
Mengidentifikasi Core Value Organisasi Melalui Model Canvas



The Value Proposition Canvas

Value Proposition

Customer Segment



Key Partners 

Siapa mitra diluar organisasi anda yang dapat bekerjasama dalam rangka melakukan aktivitas utama..?

Key Activities 

Apa Kegiatan Utama untuk bisa menghasilkan value proposition?

Key Resources 

Untuk mengerjakan aktivitas utama, sumber apa yang dibutuhkan?

Value Propositions 

Masalah apa yang ini diselesaikan dari penerima manfaat?

Untuk masing-masing penerima manfaat, Produk / Jasa terbaik yang bisa ditawarkan?

Buy-in & Support 

Untuk setiap penerima manfaat, bagaimana cara kita mendapat dukungan?

Deployment 

Bagaimana / Melalui Apa mendistribusi produk / jasa..?

Beneficiaries 

Siapa (masing-masing) Penerima Manfaat...?

Mission Budget/Cost 

Biayanya dari mana? Untuk bisa medelivery value proposition...?

Mission Achievement/Impact Factors 

Apa ukuran yang membuktikan keberhasilan produk / jasa layanan yang telah diberikan?

Key Partners



Kementerian/
Lembaga

DPR/DPD

Unit Eselon I
Kementerian
Keuangan

BPK

BPKP

BI

APH

Pemerintahan
Daerah

Media
Masa

Universitas

Key Activities



Perumusan
Keputusan dan
Perencanaan HKPD

Penganggaran dan Pengalokasian
Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah

Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Daerah

Pelaksanaan dan
Pemantauan
Transfer ke
Daerah, Dana
Desa, dan Hibah
Daerah

Penyelenggaraan
SIKD

Mandiri dan
Evaluasi
Peningkatan
HKPD

Key Resources

Informasi
dan Data

SDM

Rencana
Strategis

Kode Etik

Anggaran

SOP

Aset/
Infrastruktur

Peraturan
Perundang-
undangan



Value Propositions



Menjadi one
source data untuk
keuangan daerah di
level nasional

Pembina jabatan
fungsional analis
keuangan pusat dan
daerah

Kewenangan sebagai
penyedia layanan
terpadu keuangan
daerah (RPTKD)

Menjadi model
monitoring dan evaluasi
hubungan keuangan
pusat dan daerah

Kewenangan
perumusan formulasi
kebijakan desentralisasi
fiskal

Kewenangan akses
dan pelaksanaan transfer
ke daerah dan dana
desa

Memegang teguh nilai-nilai
kementerian keuangan
(integritas, profesionalisme,
pelayanan, sinergi,
kemampuan)

Customer Relationships



Offline: Sosialisasi,
Korespondensi,
Koordinasi, Supervisi,
Workshop, Bimbingan
Teknis, Ruang
Pelayanan Terpadu,
Kotak Saran, Site Visit

Online: Situs
djpk.depkeu.go.id, Call
Center, Help Desk

Channels



Email

SIKD

Telepon

Media
Dedts

Website

Social Media
(Facebook, Twitter)

Customer Segments



Kementerian/
Lembaga

Pemerintahan
Daerah

Masyarakat

Akademisi

Desa

Guru

Sekolah

Puskesmas

Cost Structure

Belanja
Pegawai

Belanja
Barang dan
Jasa

Belanja
Modal

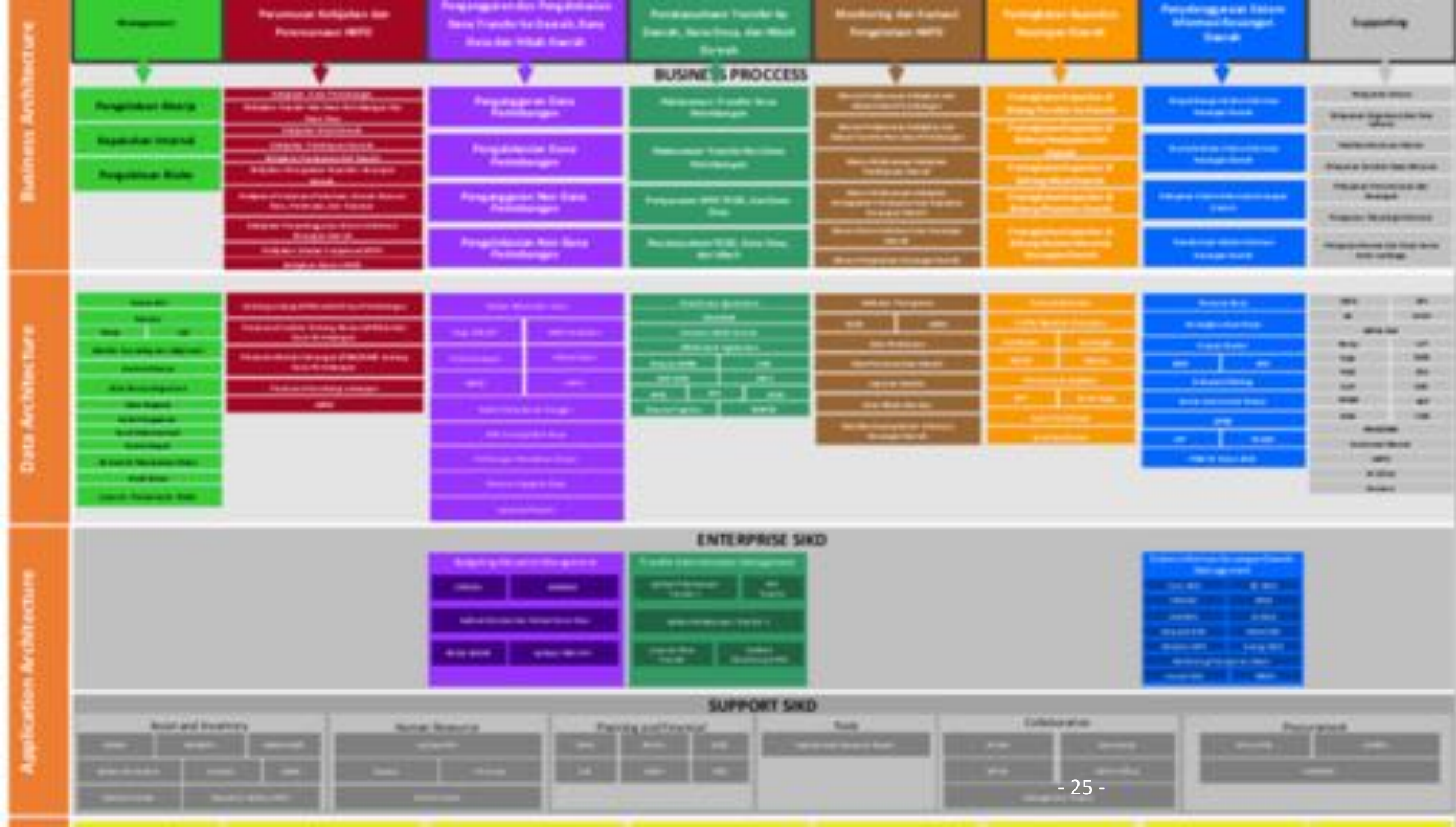


Revenue Streams

APBN

Donor



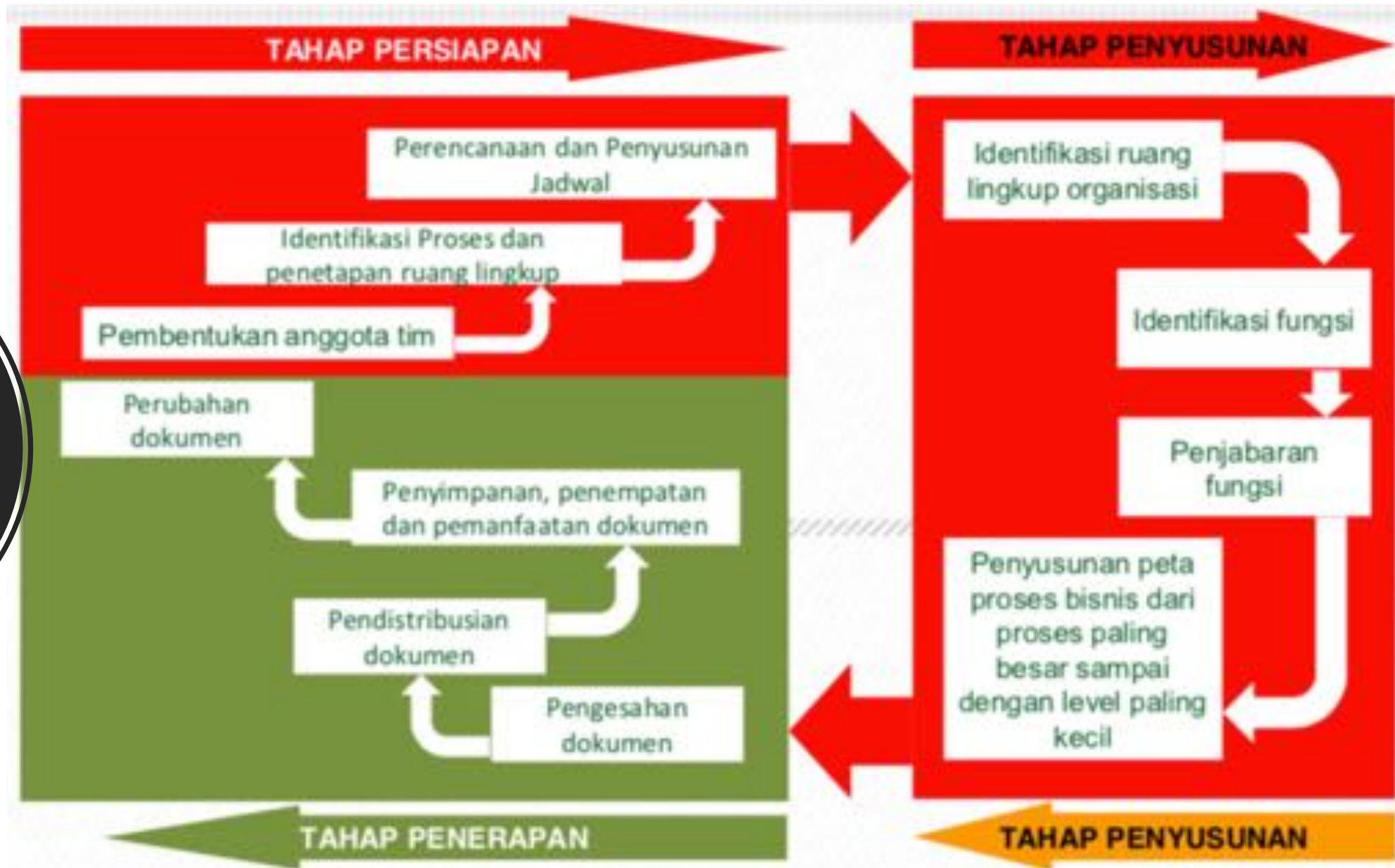


	Management	Perumusan Kebijakan HKPD	Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Management		<ul style="list-style-type: none"> Membaca Laporan Rutuk Kinerja Mengembangkan Laporan Kinerja Risiko Membaca Laporan Profil Risiko Membaca Laporan Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca Laporan Kinerja Risiko Mengembangkan Laporan Kinerja Risiko Membaca Laporan Profil Risiko Membaca Laporan Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca Laporan Rutuk Kinerja Membaca Laporan Laporan Monev Risiko Membaca Laporan Profil Risiko Membaca Laporan Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca Laporan Rutuk Kinerja Mengembangkan Laporan Kinerja Risiko Membaca Laporan Profil Risiko Membaca Laporan Hasil Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca Laporan Rutuk Kinerja Mengembangkan Laporan Kinerja Risiko Membaca Laporan Profil Risiko Membaca Laporan Hasil Audit
Perumusan Kebijakan HKPD	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengujian Penganggaran Mengajukan Usulan Revisi ke Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peningkatan Pembiayaan Penerimaan 		Mengajukan Laporan/Permohonan Penerimaan dan/atau PMN ke Badan Eksekutif Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah		Membaca Hasil Monev	
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengujian Penganggaran Mengajukan Usulan Revisi ke Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peningkatan Pembiayaan Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca Perumusan Kebijakan HKPD Membaca Instruksi/Laporan Permohonan Penerimaan dan/atau PMN ke Badan Eksekutif Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah 				
Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengujian Penganggaran Mengajukan Usulan Revisi ke Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peningkatan Pembiayaan Penerimaan 	Membaca Perumusan Kebijakan HKPD				
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengujian Penganggaran Mengajukan Usulan Revisi ke Dinas Direktorat Jenderal PK Mengajukan Usulan Peningkatan Pembiayaan Penerimaan 	Membaca Perumusan Kebijakan HKPD		Mengajukan Rekomendasi Peningkatan		
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengujian Penganggaran Mengajukan Usulan Revisi ke Dinas Direktorat Jenderal PK 	Membaca Perumusan Kebijakan HKPD				

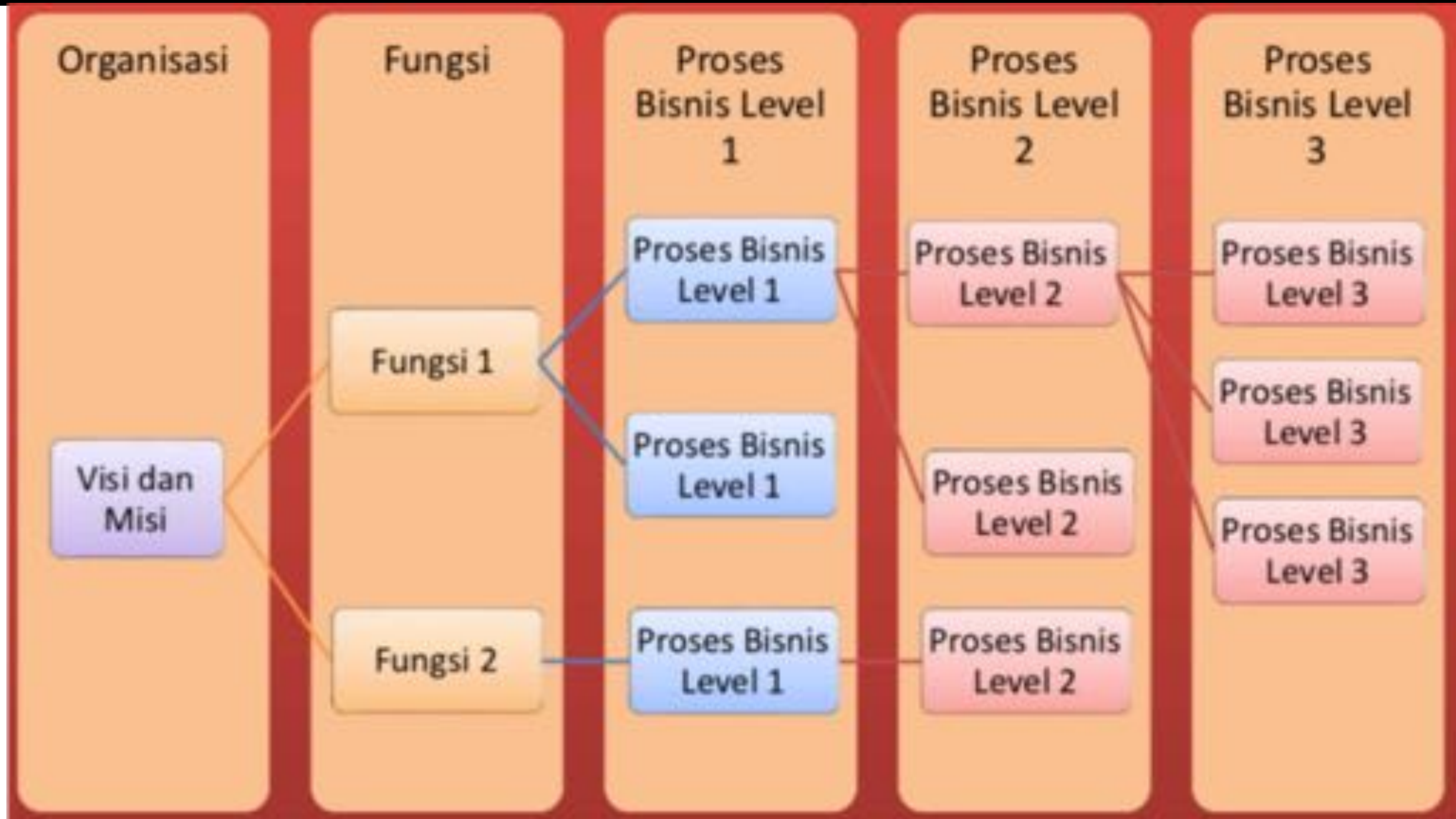
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Ragam dan Proses Penyusunan

Tahapan
Penysusunan
Proses Bisnis



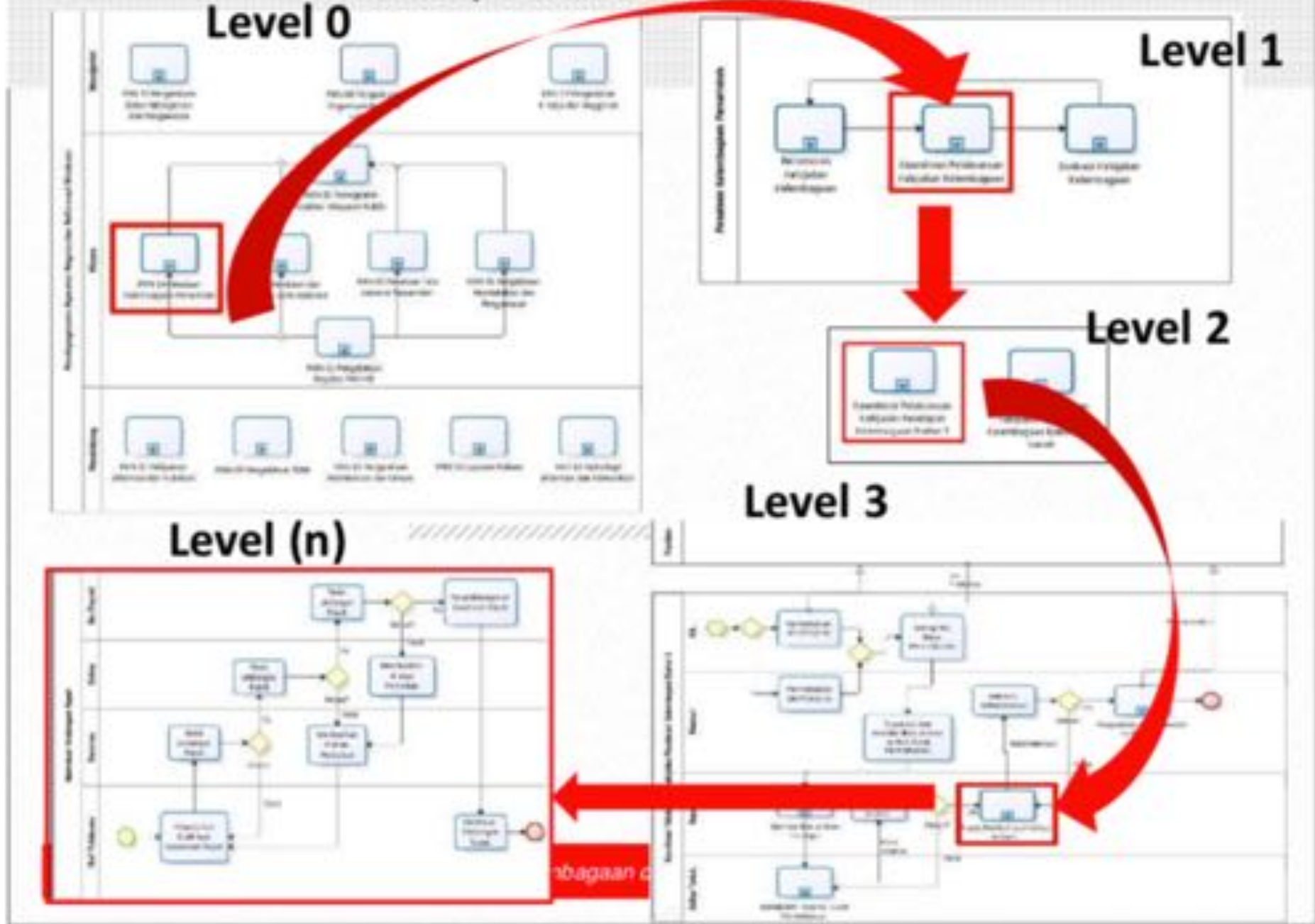
Hierarki Proses Bisnis



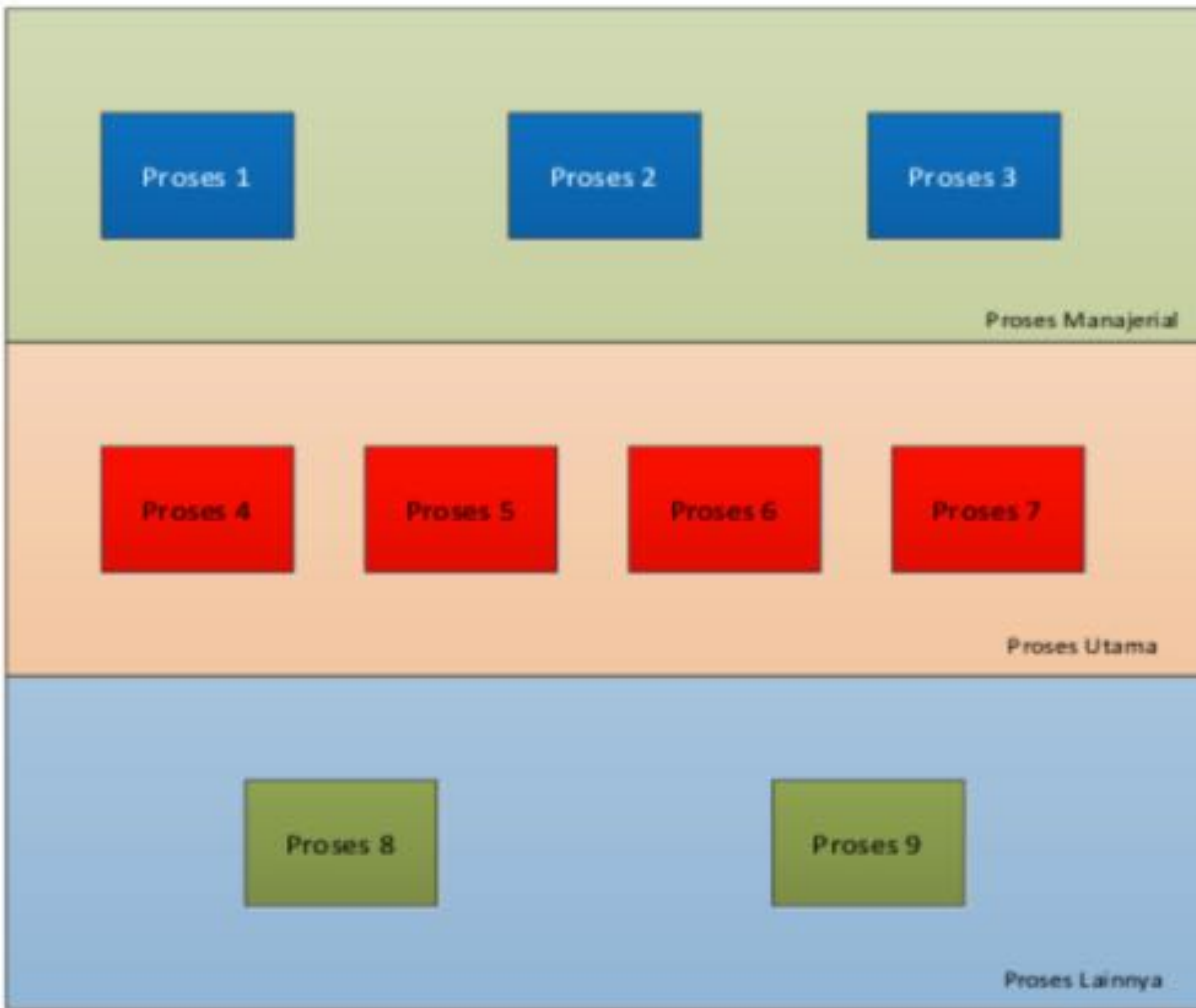
Kerangka Pengembangan Proses Bisnis



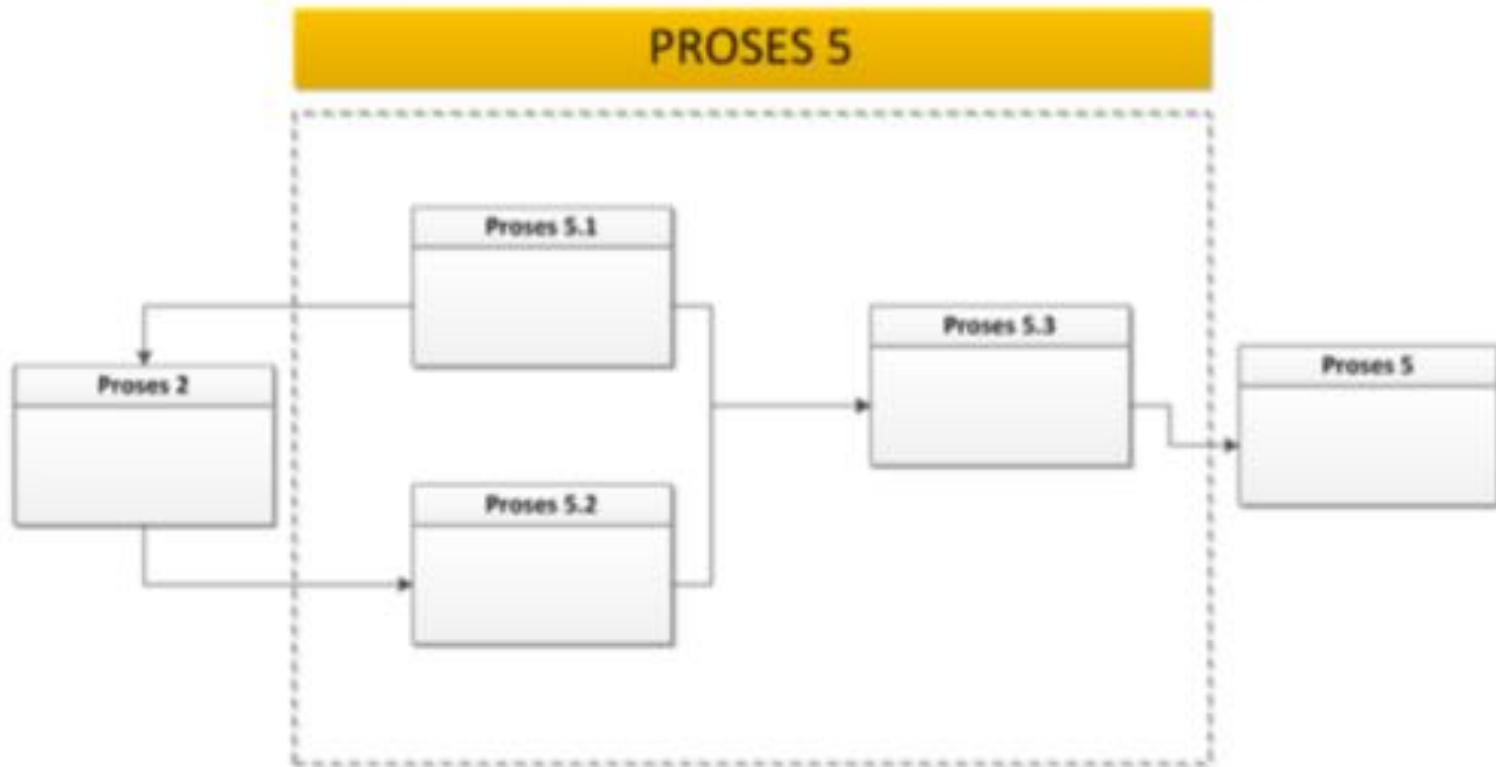
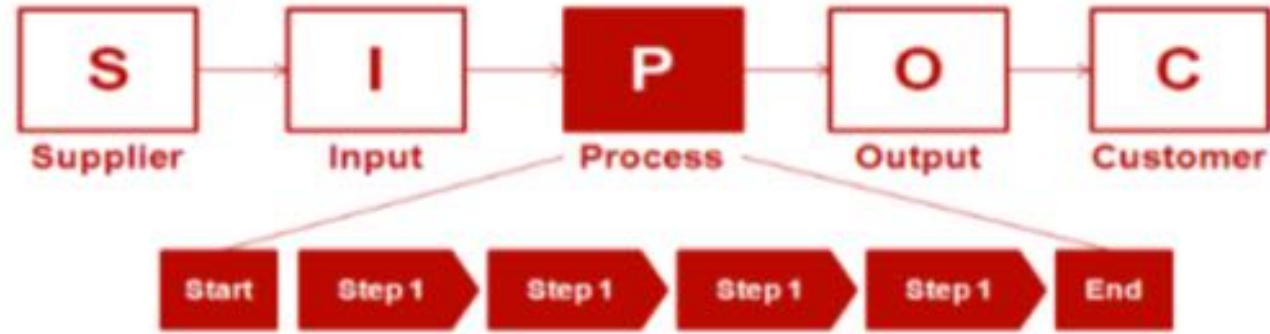
Konsep Permodelan BPMN



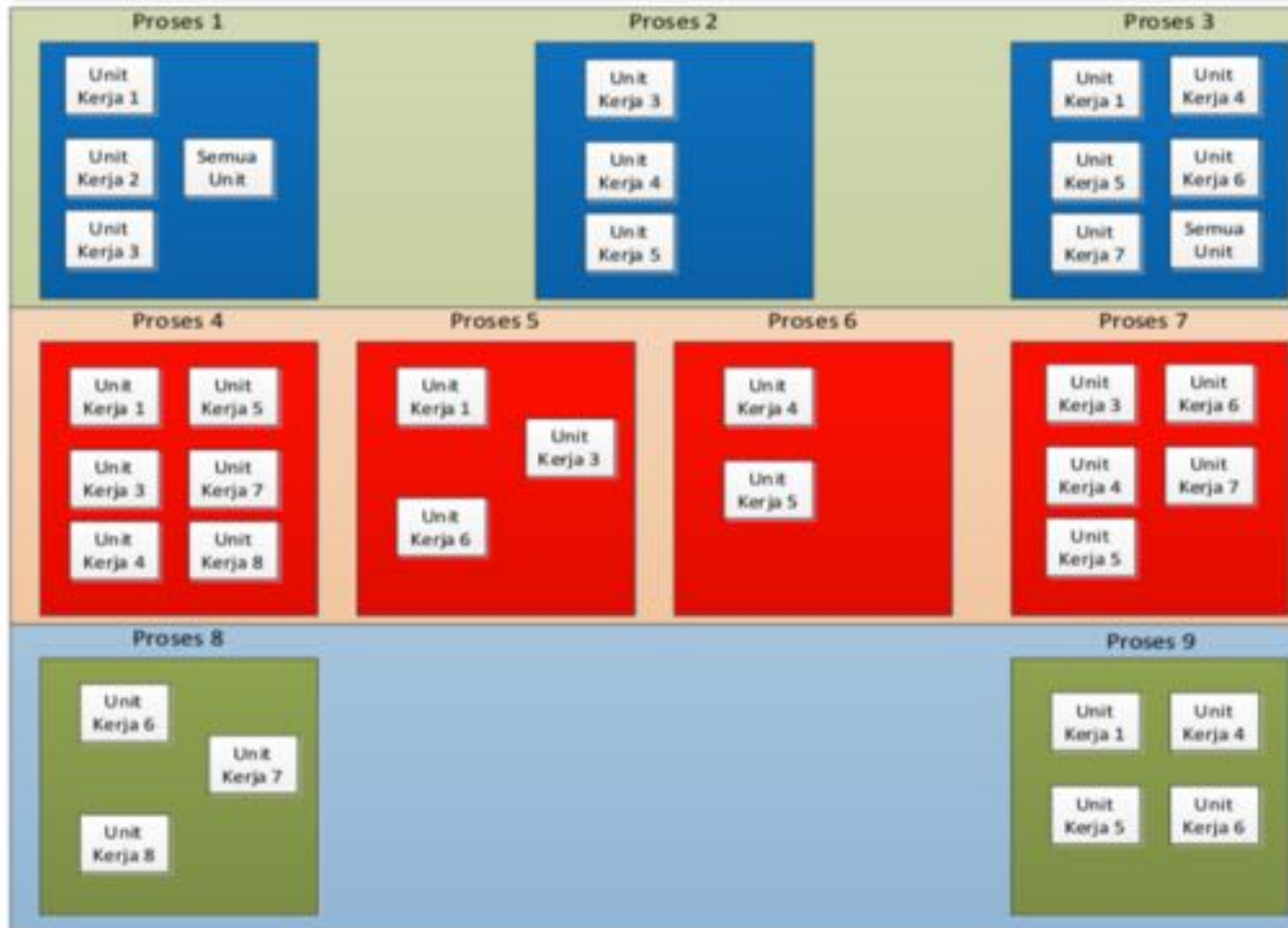
Contoh Peta Proses Bisnis (1)



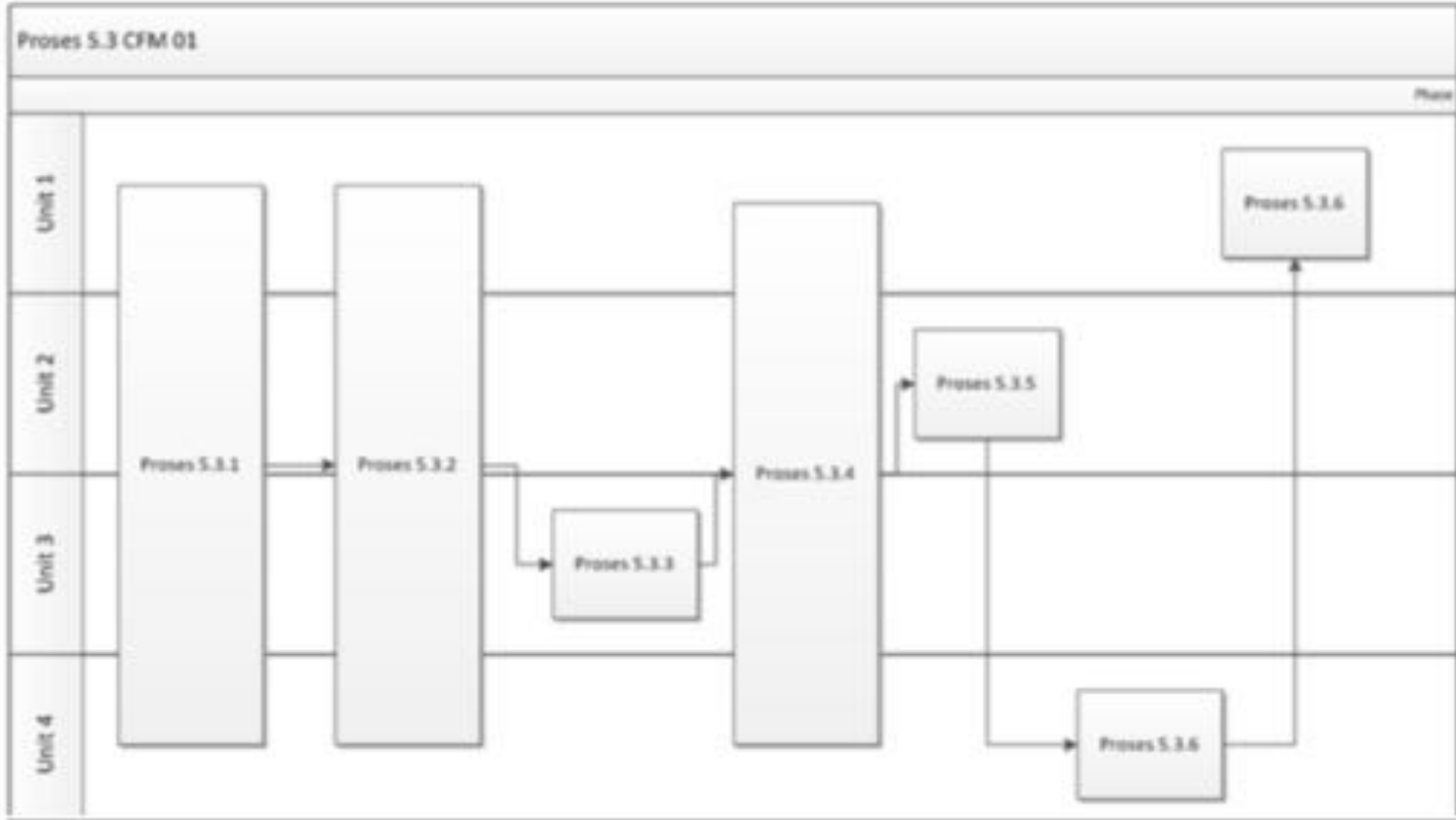
Contoh Sub-Proses (2)



Contoh Peta Relasi (3)

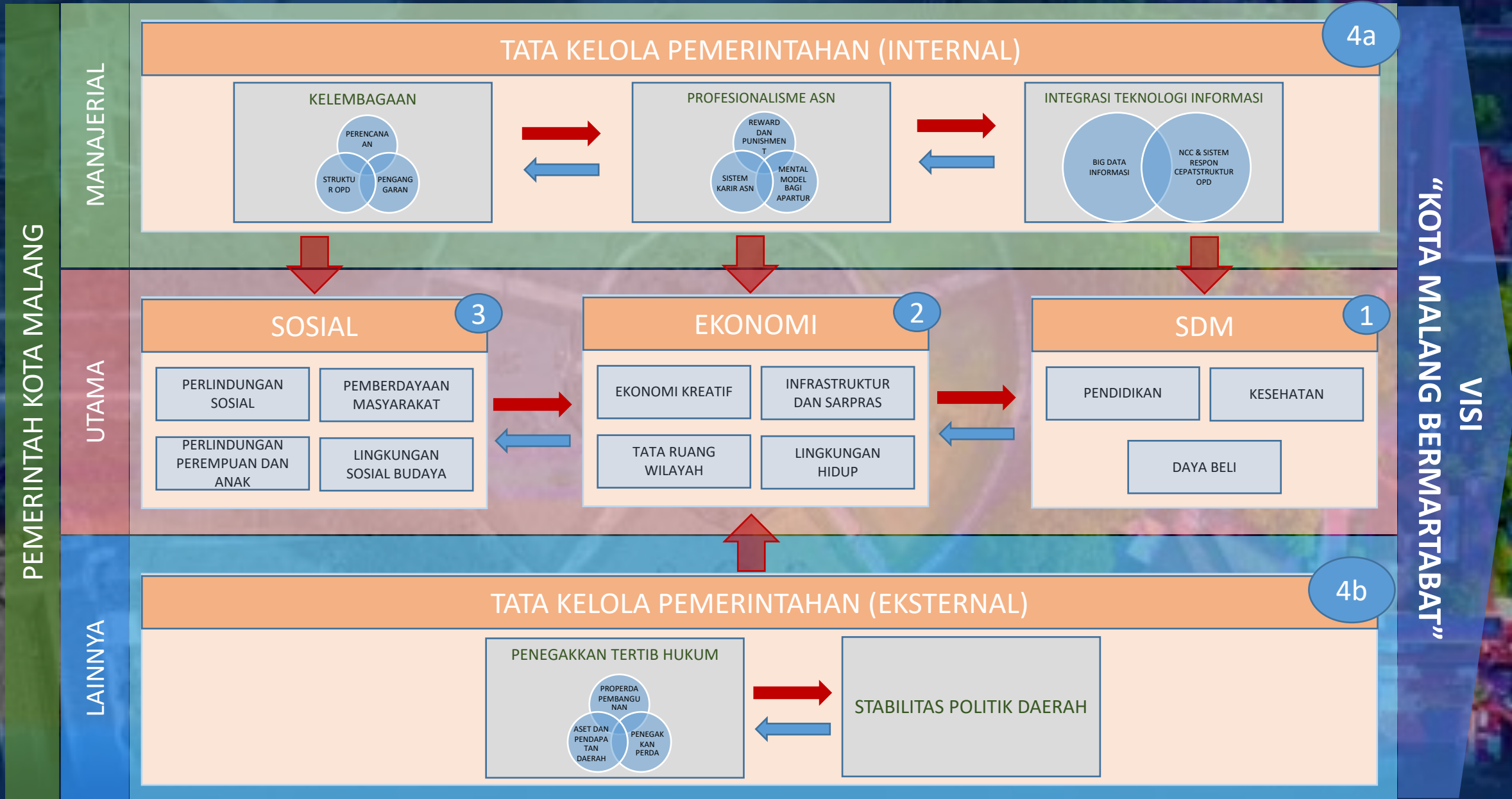


Contoh Peta Lintas Fungsi (4)



#Proses Bisnis Pencapaian Visi

Level 0



Langkah Intervensi-Misi 4

Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

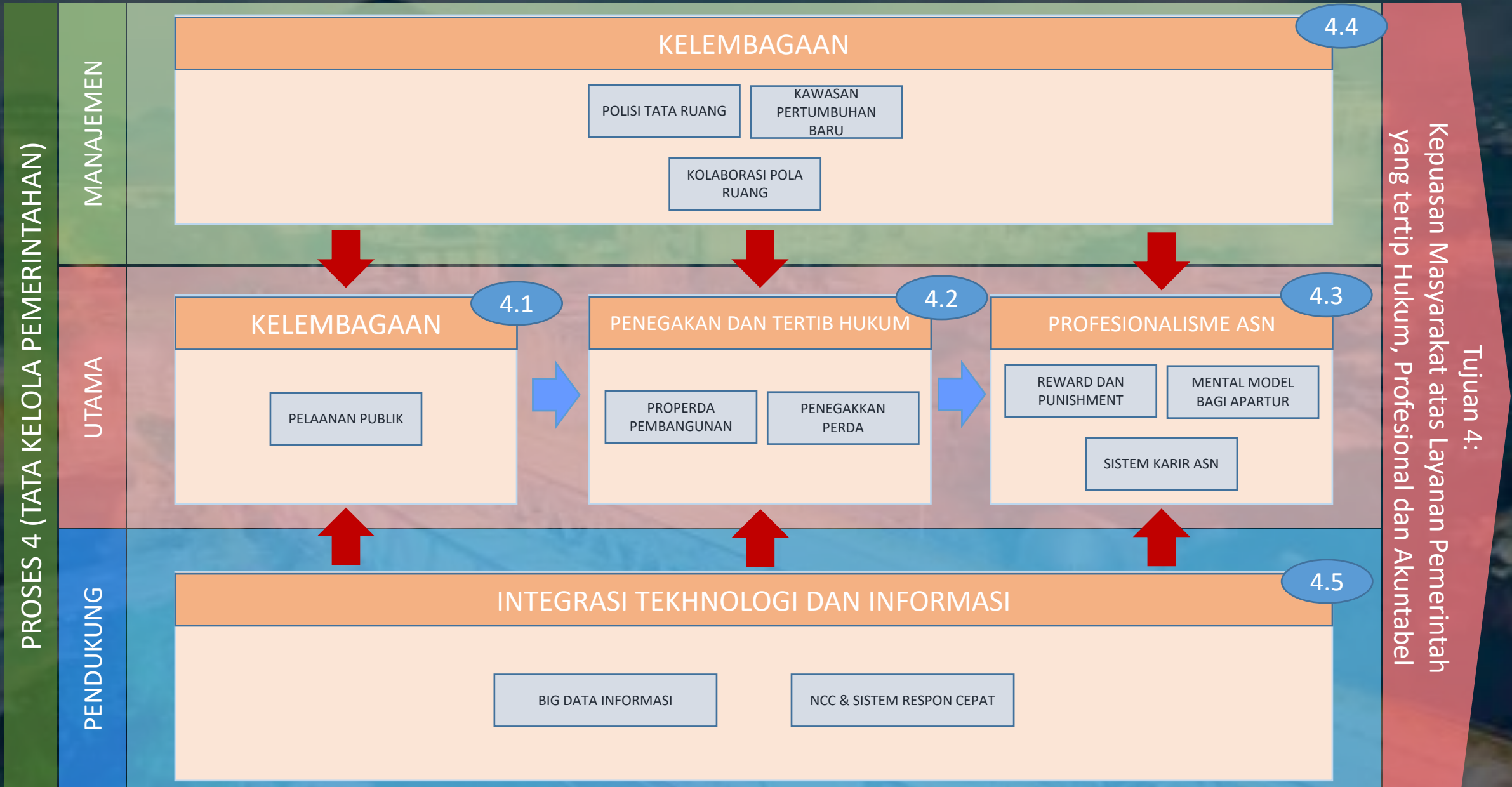


Cascading Kinerja – Misi 4



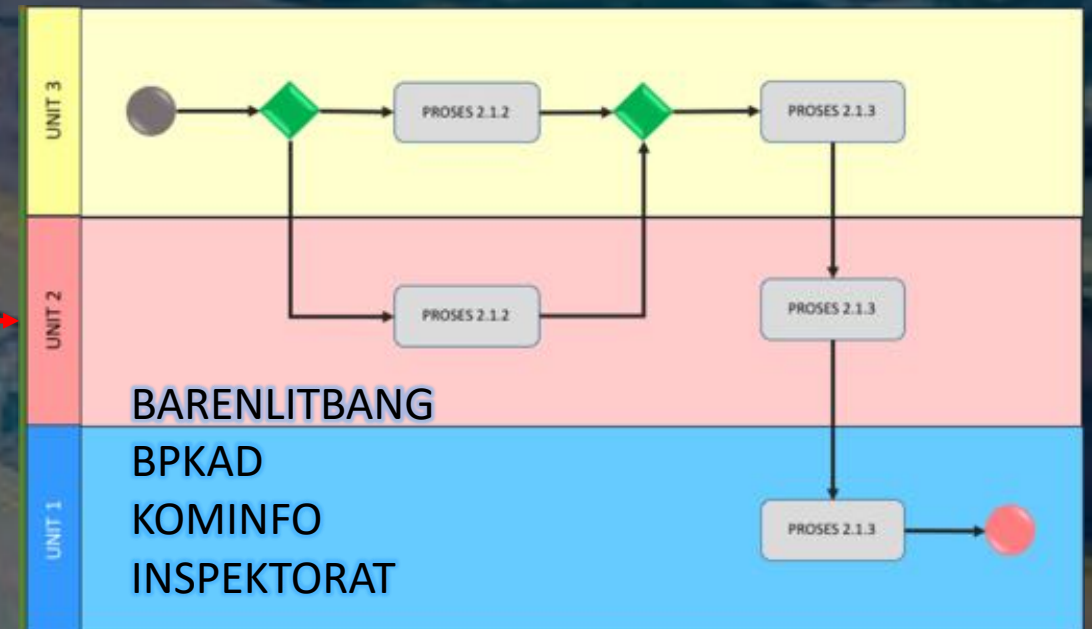
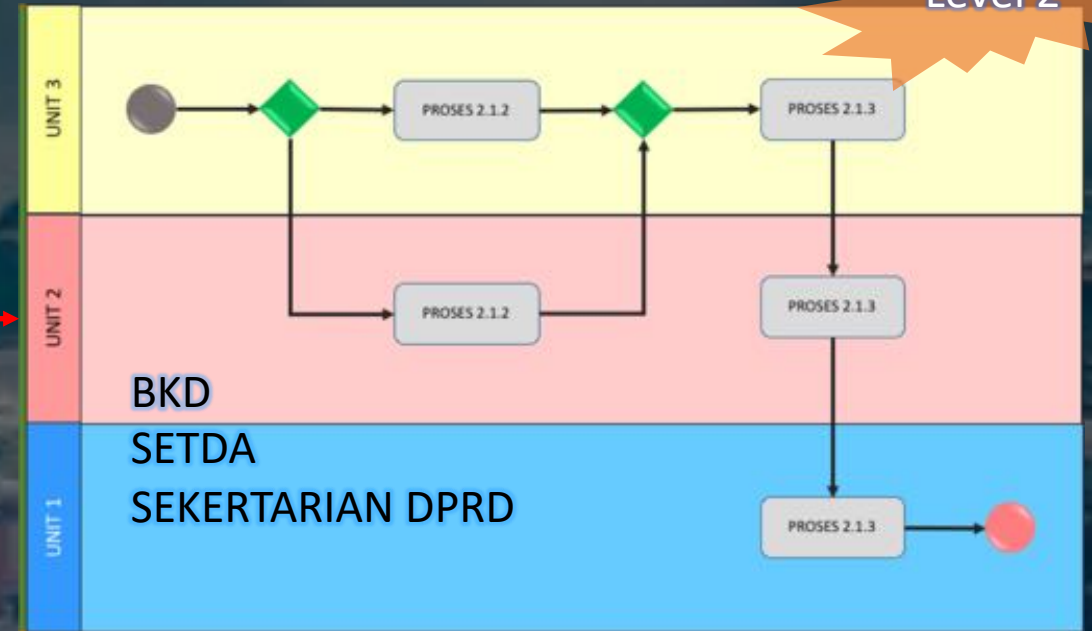
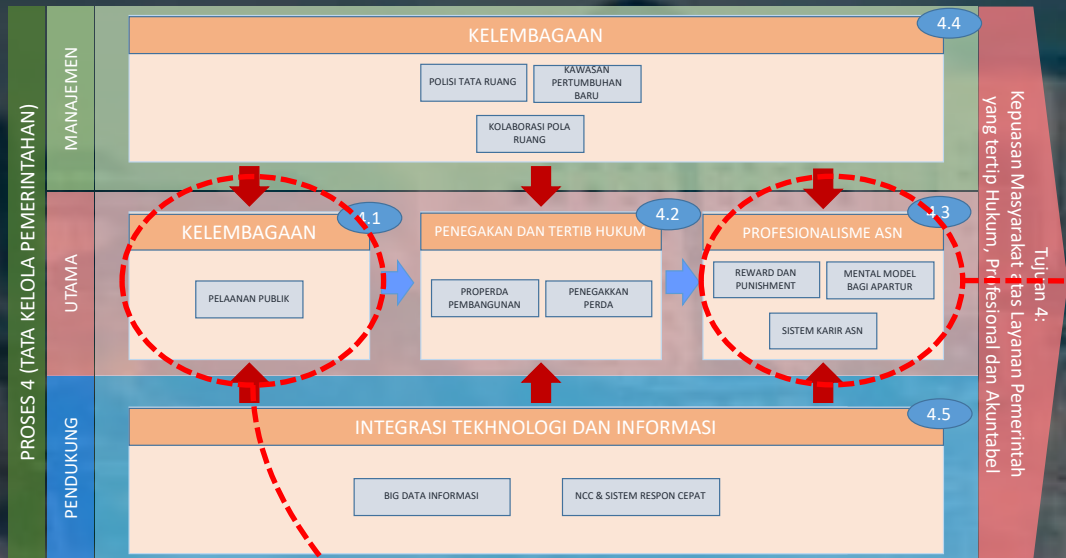
Proses Bisnis Pencapaian – Misi 4

Level 1



Breakdown Proses Bisnis – Misi 4

Level 2



Menurunkan Proses Bisnis di Level Sasaran Strategis menjadi Proses Bisnis di Level Program dan Kegiatan, oleh tiap OPD yang terlibat

A large, horizontal teal brushstroke graphic that tapers from left to right, serving as a background for the main text.

Proses bisnis adalah sebuah *Tool*
bukan *Goal...!!*

THANKS....,